

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh kondisi internasional yang menyebabkan perdagangan orang marak karena faktor Globalisasi Ekonomi. Kemudian ada Lembaga Internasional non-pemerintahan (*Amnesty International*) yang ternyata memberi peranan dalam menunjukkan usaha-usahnya kepada pemerintah untuk menanggulangi kasus perdagangan orang di Indonesia dengan menerbitkan kebijakan atau rekomendasi. Lalu perdagangan orang juga ada di Indonesia yang dimana lebih banyak menimpa perempuan dan anak pada umumnya dengan tujuan eksploitasi seksual maupun eksploitasi kerja paksa dari pekerja rumah tangga, mereka dilacurkan untuk kepentingan pribadi, industri seks, kerja dalam kondisi tidak layak dan untuk kepentingan lainnya. Misalnya, kasus TPPO dengan Modus pekerjaan layak terungkap dengan pemberitaan seorang perempuan bernama samaran Memey dan Pekerja Rumah Tangga bernama samaran Vira yang diperdayai dengan pekerjaan yang layak. Latar belakang ini menimbulkan permasalahan mengenai apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan orang, kemudian bagaimana efektivitas pemerintah jika ditinjau dari kewajiban negara dalam menanggulangi kasus perdagangan orang di Indonesia, serta bagaimana peran *Amnesty International* dalam mendorong pemerintah untuk menanggulangi kasus perdagangan orang di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang kemudian diuraikan secara sistematis dengan cara pola pikir logika deduktif.

Hasil penelitian pada penulisan hukum ini menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan orang adalah kurangnya kesadaran terhadap bahaya bermigrasi, faktor ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan, keinginan cepat kaya, faktor budaya, kurangnya pencatatan kelahiran, kurangnya pendidikan, dan lemahnya pemerintah, penegakan hukum dan korupsi. Adapun hingga saat ini Pemerintah belum dapat secara efektif menanggulangi kasus perdagangan orang di Indonesia, hal ini terlihat dari peninjauan dalam pemenuhan kewajiban negara secara keseluruhan. Oleh karena itu *Amnesty International* memberikan suatu peranan berupa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia, namun sayangnya belum diterapkan sepenuhnya dimana hanya melaksanakan dengan menerbitkan undang-undang perkawinan baru dan belum mengesahkan legislasi terkait Rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, hal inilah yang dianggap *Amnesty International* cukup berperan penting dalam mendorong pemerintah untuk menanggulangi kasus perdagangan orang di Indonesia.

Kata Kunci: *Amnesty International*, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

The background of this research by international conditions that cause trafficking in persons to flourish due to economic globalization factors. Then there is the non-governmental international organization (Amnesty International) which turns out to play a role in demonstrating its efforts to the government to tackle trafficking in persons in Indonesia by issuing policies or recommendations. Then trafficking in persons also exists in Indonesia, where it affects women and children in general for the purpose of sexual exploitation or forced labor exploitation of domestic workers, they are prostituted for personal gain, the sex industry, work in improper conditions and for other interests. For example, the case of TIP with a decent work mode was revealed by the news of a woman named Memey and a domestic worker named Vira who was tricked with decent work. This background raises the problem of what are the factors that cause trafficking in persons, then how the government is effective in terms of state obligations in tackling cases of trafficking in persons in Indonesia, and how Amnesty International's role is in encouraging the government to tackle cases of trafficking in persons in Indonesia.

This research used a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification. The data was used in this research is secondary data collected by a literature study. Data analysis was carried out with qualitative methods, which were described systematically by means of a deductive logic mindset.

The results of this research on legal writing explain that the factors that cause trafficking in persons are a lack of awareness of the dangers of migration, economic factors that lead to poverty, a desire to get rich quick, cultural factors, lack of birth registration, lack of education, and weak government, law enforcement and corruption. As for the time being, the Government has not been able to effectively tackle cases of trafficking in persons in Indonesia, this can be seen from a review of the fulfillment of the country's overall obligations. Therefore Amnesty International has given a role in the form of recommendations to the Indonesian government to take further steps against trafficking in persons in Indonesia, but unfortunately it has not been fully implemented where it has only implemented it by issuing a new marriage law and has not passed legislation related to the Draft Law. Law on the protection of domestic workers, this is what Amnesty International considers to have an important role in encouraging the government to tackle cases of trafficking in persons in Indonesia.

Keywords: Amnesty International, Human Trafficking.